

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi yang terepresentasi dalam *trias politika* (eksekutif, legislatif, yudikatif) sebagai tonggak negara Indonesia hendaknya kemudian bisa lebih optimal teraplikasi demi terwujudnya Indonesia adidaya yang bukan hanya berdaulat secara konstitusi, namun juga secara identitas dan penemuan kembali jati dirinya. Sebagai negara demokrasi, ketiga pilar tersebut belumlah lengkap tanpa kehadiran pilar keempat yang menopang proses dinamisasi wacana menuju Indonesia lebih baik. Pilar itu adalah media dan mahasiswa. Menjelang Pemilu 2009, sudah selayaknya lah pilar keempat ini bergerak lebih agresif dalam mengawal proses keberlangsungan pemilu yang bersih dan cerdas. Mengingat kiprah kedua elemen ini lebih diyakini keefektifannya karena independensi dan tentu saja objektivitasnya mengusung wacana kesejahteraan masyarakat.¹

Gerakan mahasiswa dalam proses pemilu 2009² Adalah sebuah tantangan besar bagi gerakan mahasiswa untuk mengembalikan kembali kepercayaan rakyat dan meyakinkan kepada publik bahwa gerakan ini *pure* atas dasar moral dan kesejahteraan rakyat. Bukan justru sebuah mesin politik elite untuk kemudian lebih memuluskan menuju kursi kekuasaan yang diperebutkan. Sejarah menunjukkan kegemilangan gerakan mahasiswa dalam proses kontribusi bagi

¹ [http://blog.ac.id/Politik /Gerakan Mahasiswa Pada Pemilu 2009](http://blog.ac.id/Politik/Gerakan%20Mahasiswa%20Pada%20Pemilu%202009). Di Akses 11 April 2010

² Ibid.

mengokohkan tonggak kedaulatan bangsa.³ Tercatat dari gerakan Boedi Oetomo, gerakan 45, gerakan 66, gerakan 78, hingga gerakan reformasi 98 menjelaskan posisi mahasiswa dalam negara sebagai aset strategis perubahan (agent of change). Namun dalam kesemua hal itu, sejarah juga mencatatkan pencapaian itu tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang konstisten dari gerakan mahasiswa. Wacana ini bukan saja menyebabkan polarisasi hingga perpecahan gerakan mahasiswa, namun juga mempertipis nilai independensi moral gerakan mahasiswa.

Politik tidak bisa dipisahkan dari gerakan mahasiswa, namun demikian kekurangmatangan pengalaman politik yang *dienyam* gerakan mahasiswa menjadi boomerang bagi gerakan ini. Seolah karbitan, seiringnya idealita yang dibangun gerakan mahasiswa tidak selalu sesuai dengan realita ketika mereka menjadi aktornya. Secara teoritis, gerakan mahasiswa bisa saja disejajarkan (bahkan bisa jadi lebih paham) akan seluk beluk demokrasi yang sebenarnya. Namun secara aplikatif dan pengalaman, gerakan mahasiswa lumayan jauh tertinggal.

Kemudian disisi lain terkadang dimanfaatkan oleh gerakan elit politik dalam mengarahkan peran mahasiswa menjadi politik keberpihakan atau bahkan politik kepentingan. Namun kondisi demikian memang sering terjadi. Gerakan mahasiswa sebaiknya mengevaluasi perjalananan gerakannya dalam kiprah perpolitikan Indonesia. Namun demikian, tidak dengan acuh atau berdiam. Pilihan

³ Ibid.

apakah dengan tetap berada pada gerakan politik ekstraparlementer atau memasuki sistem hendaknya bukan menjadi pemicu fragmentasi gerakan mahasiswa. Itu adalah sebuah pilihan politik.

Gerakan mahasiswa untuk lebih produktif, dan independen dalam menggiring proses pesta demokrasi kali ini hingga menghantarkannya pada idealita yang seharusnya. Gerakan mahasiswa tentu saja dinantikan berbagai kalangan, lebih khusus rakyat. Rakyat sebenarnya masih menaruh harapan besar pada gerakan mahasiswa. Namun hal ini tentu juga mesti dibarengi dengan bukti karya nyata sebagai kesungguhan gerakan ini memperjuangkan kebenaran dan keberpihakan kepada kebenaran.

Usaha politik mahasiswa kekinian tentu harus di dukung semangat yang terdapat pada gerakan mahasiswa di Indonesia telah secara jelas menyatakan sikapnya pada proses pemilu. Terlihat dari Garda Pemilu bentukan mahasiswa dan beberapa gerakan pengawalan pemilu lainnya. Meskipun beberapa masih terlihat malu – malu dalam bersikap. Namun hal ini tentu saja menjadi berita gembira bagi demokrasi di negara Indonesia.

Peran mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan masa untuk mendorong reformasi politik adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kaum intelektual. Berbeda dengan gerakan revolusi, gerakan reformasi seperti dikatakan, Nanlin, berbeda dengan gerakan revolusi yang mengejar perubahan struktural yang fundamental. Gerakan reformasi berusaha memodifikasi

hubungan struktural tanpa mengancam eksistensi insitusi. Menurut Arbi ada dua tahap dalam reformasi politik. *Pertama*, tahap transisi yang merupakan proses peralihan dari proses krisis politik ke proses normal kehidupan politik.⁴ Di tahap transisi, pemicu proses reformasi akan mengawal aktualisasinya. Ada lima kemungkinan peristiwa politik yang berpotensi menjadi pemicu yang akan mengawali berlangsungnya proses reformasi politik yaitu kudeta, kesadaran penguasa, tekanan publik opini kepada penguasa, presiden meninggal dan people's power yang aktif dan kuat.

Tahap *kedua*, reformasi normal dimana reformasi dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada. Reformasi normal ini dilakukan melalui reformasi suprastruktur dan infrastruktur.

Untuk itulah diperlukan suatu gerakan membawa perubahan kecerdasan pada pemilih Indonesia dalam pemilu 2009. Agar dapat menjadi titik tolak sebuah perubahan politik kearah lebih substantif.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai bagian tak terpisahkan dalam komponen bangsa, mencoba memberikan sebuah pemahaman akan pentingnya arti kecerdasan dalam menentukan sebuah pilihan. Dengan gerakannya yang bernama gerakan pemilih cerdas.

HMI sebagai salah satu organisasi mahasiswa tertua dan terbesar dimana

⁴ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, hal, 129.

hingga kini telah berusia lebih dari 62 tahun sejak kelahirannya pada 5 Februari 1947 lalu berperan sebagai moral force (kekuatan moral) dan kelompok penekan (pressure group) sehingga dengan adanya peran ini mewajibkan HMI untuk berada di luar struktur kekuasaan ataupun kebijakan yang berjalan. Dalam hal ini, HMI Yogyakarta haruslah independen dalam setiap gerak langkahnya. Untuk itu, konstelasi politik Pemilu 2009 merupakan lingkup kecil dari upaya pengimplementasian independensi itu. Karena memang pada realitasnya independensi HMI tidak hanya ada pada momen-momen Pemilu dan politik lainnya, melainkan HMI berkewajiban memegang prinsip independensi ini dengan kokoh dan tanpa tawar-menawar dalam seluruh aktivitas keorganisasiannya.⁵

Upaya memposisikan dan menguatkan peran sebagai mahasiswa dan kader HMI adalah untuk bergerak bersama dalam melawan neoliberalisme, yang mana paham ini telah merajalela di negeri ini. Sehingga aspek sosial, budaya, ekonomi, politik telah menjadi doktrin baru bagi para penggerak dan pengambil segala kebijakan negara dan menjadi pangkal persoalan serta penderitaan rakyat Indonesia selama puluhan tahun.

Mahasiswa dan gerakan adalah sebuah komponen yang tidak bisa dipisahkan karena disamping mahasiswa sebagai agen/elit intelektual, agen perubahan sekaligus yang mampu mengkonsepsikan bagaimana membangun

⁵ http://blog.ac.id/Politik/Pernyataan_Sikap_HMI. Di Akses 2010

gerakan perubahan bangsa dari keterpurukan dan dapat memberikan pengaruh besar terhadap problematika sosial. Kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus menjadi penggerak untuk mengimplementasikan fungsi dan peran himpunan dalam mereposisi serta menguatkan peran mahasiswa melawan neoliberalisme yang membuat kita tidak bisa tinggal diam.

Ketika pemilu 2009 yang lalu peran organisasi Himpunan Mahasiswa Islam sebagai salah satu gerakan mahasiswa dimana mereka sebagai organisasi kader yang memberikan nilai-nilai positif kepada rakyat Indonesia, HMI sebagai organisasi yang tersebar luas diseluruh Indonesia yang mempunyai peran yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia, ketika HMI dihadapkan pada pemilu 2009. Peran HMI sebagai gerakan mahasiswa dalam pemilu 2009 yang lalu HMI yang mengatas dirinya sebagai organisasi yang bersifat independen, dimana HMI harus berperan aktif dalam mengawal jalannya pemilu agar berjalan dengan baik Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta berperan aktif dalam mensukseskan pemilu, agar tidak terjadi kesalah fahaman dari masing-masing calon peserta pemilu, maka HMI harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan pemilu 2009.

Peran yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta dalam mengawal jalannya pemilu agar berjalan dengan baik maka peran yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta mengadakan kontrak kerjasama bersama KPU untuk mensukseskan pemilu.

Dengan adanya kontrak kerjasama bersama KPU, Himpunan Mahasiswa Islam berperan aktif dalam mensukseskan pemilu 2009 dengan memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang kurang mengerti dalam pencontrengan disamping itu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta membuka posko peduli untuk Indonesia, dengan adanya gerakan seperti ini agar bisa mengurangi golput dan juga untuk menghindari kecurangan dalam pemilu.

Sebagai organisasi dari gerakan mahasiswa perjuangan misi HMI tidak akan lepas dari dunia kampus, perkembangan jumlah perguruan tinggi dan bertambahnya jumlah mahasiswa di Indonesia sangat akan menunjang HMI di masa mendatang.

Disamping itu ada dua bentuk sumber daya yang dimiliki mahasiswa dan dijadikan energi pendorong gerakan mereka. *Pertama*, ialah Ilmu pengetahuan yang diperoleh baik melalui mimbar akademis atau melalui kelompok-kelompok diskusi dan kajian. *Kedua*, sikap idealisme yang lazim menjadi ciri khas mahasiswa.⁶ Kedua potensi sumber daya tersebut 'digodok' tidak hanya melalui kegiatan akademis didalam kampus, tetapi juga lewat organisasi-organisasi ekstra universitas yang banyak terdapat di hampir semua perguruan tinggi.

Jika dilihat bahwa setiap anggota HMI memiliki 3 status. Status tersebut yaitu 1) anggota HMI adalah seorang mahasiswa; 2) anggota HMI adalah seorang

⁶ http://blog.ac.id/Politik/Akar_Ideologi_Gerakan_Mahasiswa.html

Islam; 3) anggota HMI adalah warga Negara Indonesia. Ketiga status tersebut sudah pasti melekat pada setiap anggota HMI.

Seperti halnya setatus yang dimiliki oleh anggota HMI, ketiga status tersebut memiliki amanah/tanggungjawab yang harus diemban. Hal ini sudah menjadi konsekuensi logis.

- 1) Sebagai seorang mahasiswa maka mempunyai kewajiban untuk senantiasa menggunakan keintelektualannya untuk menegakkan kebenaran, mengabdikan kepada Negara, dan membela kaum yang tertindas.
- 2) Sebagai warga Negara Indonesia harus mempunyai kewajiban untuk mewujudkan cita-cita Negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur (memusnahkan ketertindasan).
- 3) Begitu pula sebagai seorang Islam harus senantiasa menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam untuk mendapatkan ridho Illahi.

Peran HMI dalam sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. HMI dengan sengaja telah ikut mewarnai sejarah Indonesia dengan menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader. Cukup banyak tokoh yang telah dilahirkan dari rahim perkaderan HMI, baik itu yang berkiprah di tingkat nasional maupun lokal. Namun bukan tanpa menafikan sebuah proses alamiah yang terjadi pada manusia, dimana sesuai dengan fitrahnya manusia memiliki kecenderungan berbuat benar

dan salah, banyak pula kader bangsa hasil didikan HMI yang menjadi faktor dan aktor terjadinya krisis multidimensi negeri ini.

Alasan penulis memilih judul skripsi ini dapat dikemukakan atas beberapa dasar pemikiran yang melandasinya :

Pertama, Peran mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan massa untuk mendorong reformasi politik adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kaum intelektual. Berbeda dengan gerakan revolusi, gerakan reformasi seperti dikatakan, Nanlin, berbeda dengan gerakan revolusi yang mengejar perubahan struktural yang fundamental. Gerakan reformasi berusaha memodifikasi hubungan struktural tanpa mengancam eksistensi insitisi.

Kedua, Upaya memposisikan dan menguatkan peran sebagai mahasiswa dan kader HMI adalah untuk bergerak bersama dalam melawan neoliberalisme, yang mana paham ini telah merajalela di negeri ini. Sehingga aspek sosial, budaya, ekonomi, politik telah menjadi doktrin baru bagi para penggerak dan pengambil segala kebijakan negara dan menjadi pangkal persoalan serta penderitaan rakyat Indonesia selama puluhan tahun.

Ketiga, Mahasiswa dan gerakan adalah sebuah komponen yang tidak bisa dipisahkan karena disamping mahasiswa sebagai agen/elit intelektual, agen perubahan sekaligus yang mampu mengkonsepsikan bagaimana membangun gerakan perubahan bangsa dari keterpurukan dan dapat memberikan pengaruh besar terhadap problematika sosial.

Sedangkan alasan penulis menjadikan HMI sebagai objek penelitian karena, gerakan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam ini mempunyai basis massa yang khas yakni muda, Islam, dan suatu organisasi pengkaderan yang terdidik. Hal ini menjadi suatu potensi kekuatan yang sangat luar biasa bagi perkembangan mahasiswa di masa depan, sehingga sangat wajar bagi kita untuk menaruh perhatian yang lebih terhadap aktivitas gerakan mahasiswa yang bermaung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan asumsi tersebut serta melihat kondisi dinamika rakyat yang ada di Indonesia maka masalah penelitian yang dapat peneliti rumuskan adalah :
Bagaimana Peran HMI Pada Pemilu Legislatif 2009? Studi Kasus Pada HMI-Dipo Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. BATASAN MASALAH

Agar terdapat kejelasan arah dan fokus dalam penulisan karya tulis ini diperlukan adanya lingkup penulisan yang kami batasi pada beberapa batasan bahwa sikap politik HMI dalam proses kesejarahannya memperlihatkan dinamika politik yang cukup menarik untuk di kaji lebih dalam, terutama.

1. Peran HMI Yogyakarta dalam persiapan pemilu 2009
2. Peran HMI Yogyakarta dalam pelaksanaan pemilu 2009
3. Peran HMI Yogyakarta dalam mensukseskan pemilu 2009

Mengenai jangkauan waktu kita memfokuskan kepada masa era reformasi. Namun demikian untuk memberikan suatu perspektif yang lebih tentang latar belakang masalah dari objek penulisan karya ini. Masa reformasi kami fahami sebagai upaya penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Demikian batasan masalah dari penulisan karya ini.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji dari suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Sesuai dengan asumsi tersebut penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana peran HMI Yogyakarta pada pemilu legislatif 2009.
2. Mengetahui arah pergerakan HMI serta orientasi ideologi yang digunakan.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian diatas manfaat dari hasil penelitian ini :

1. Secara teoritis nantinya diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan kepada mahasiswa tentang peran HMI dalam pergulatan politik pada pemilu 2009

E. KERANGKA DASAR TEORI

1. Teori Interest Group

Berbagai macam kepentingan dapat kita temukan pada setiap masyarakat di manapun mereka berada. Kepentingan-kepentingan tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.

Cara yang di tempuh oleh masyarakat untuk memenuhi kepentingan mereka adalah dengan menagartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijaksanaan.

Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan oleh berbagai lembaga badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Lembaga-lembaga badan-badan ataupun kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat tadi dibentuk oleh pihak suwasta (masyarakat sendiri) mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat.⁷

Fungsi artikulasi kepentingan ini disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan. Cintohnya Di Inggris, Partai Konservatif harus bersaing dengan partai Buruh dan Liberal dalam memperoleh dukukungan dari berbagai kelompok kepentingan di negaranya. Dalam usaha memenangkan persaingan partai konservativ mengundang kelompok ekonomi, regional atau lokal untuk

⁷ Eko Priyo Purnomo, *Sistem Politik Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2007. hal 23-26

menyatakan kepentingan mereka dan untuk ikut mempengaruhi kebijaksanaan Partai Konservatif melalui kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat dan konferensi tahunan partai dan komite-komite Partai Konservatif yang ada dalam parlemen.

Mengenai kelompok kepentingan pada umumnya dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

a. Kelompok Kepentingan Anomik

Kelompok kepentingan anomik atau *anomic interest group* sering dipergunakan untuk menunjuk kepada kelompok kepentingan yang melakukan kegiatan-kegiatannya secara spontan dan hanya berlangsung seketika saja.

Kelompok kepentingan tipe ini tidak memiliki norma-norma dan nilai-nilai secara jelas yang mengaturnya. Kelompok kepentingan ini melakukan kegiatannya dengan cara-cara yang non konvensional: seperti pemogokan, demonstrasi, huruhara, kerusuhan konfrontasi dan lainnya.

Kelompok kepentingan anomik ini merupakan suatu kelompok yang tidak terorganisir secara rapi. Pendukung-pendukung kelompok kepentingan tipe ini dapat secara bebas keluar meninggalkan kelompoknya. Pada umumnya kelompok kepentingan ini setelah berhasil dalam mengajukan tuntutan-tuntutan atau kepentingan-kepentingan segera bubar dengan sendirinya.⁸

⁸ Ibid, hal 24

b. Kelompok Kepentingan Non Assosional

kelompok kepentingan ini merupakan kepentingan yang dapat dikatakan kurang terorganisir secara rapi, dan kegiatannya masih bersifat kadangkala saja. Keanggotaan kelompok kepentingan non assosional dapat diperoleh berdasarkan atas kepentingan-kepentingan yang serupa karena persamaan-persamaan dalam hal-hal yang tertentu seperti keluarga, status, kelas dan lain sebagainya. Kelompok kepentingan ini tidak mempunyai struktur organisasi yang formal. Untuk dapat masuk menjadi anggota kelompok tipe ini tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Demikian pula kegiatan untuk memilih pimpinan kelompok atau kegiatan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan kelompok tanpa harus melalui prosedur-prosedur yang formal.

Kelompok kepentingan non assosional merupakan ciri bagi masyarakat yang belum begitu maju atau yang sedang berkembang. Namun kelompok-kelompok kepentingan assosional juga terdapat negara-negara yang sudah maju, kelompok-kelompok kepentingan tipe ini dapat berwujud dalam bentuk kelompok-kelompok keluarga yang memiliki pengaruh yang sangat besar, mungkin pula berwujud dalam bentuk kelompok-kelompok kedaerahan yang juga memiliki pengaruh yang sangat besar dan pengaruh-pengaruh dari kelompok tersebut kadang-kadang lebih besar daripada pengaruh-pengaruh yang dimiliki oleh kelompok-kelompok profesional atau serikat-serikat buruh.⁹

⁹ Ibid, hal 25

c. Kelompok Kepentingan Institusional

kelompok kepentingan Institusional merupakan kelompok kepentingan yang bersifat formal dan sudah terorganisir secara rapi dan teratur. Serta memiliki fungsi-fungsi sosial politik yang lainnya disamping berfungsi mengartikulasikan kepentingan.

Keanggotaan kelompok terdiri dari orang-orang profesional dibidangnya. Untuk dapat masuk dalam anggota ini diperlukan persyaratan-persyaratan formal yang memang telah telah ditentukan.

Kelompok kepentingan institusional, baik sebagai suatu badan hukum ataupun sebagai kelompok-kelompok yang lebih kecil yang terdapat dalam badan hukum itu, selain mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok yang lainnya yang ada di dalam masyarakat.¹⁰

d. Kelompok Kepentingan Assosional

Kelompok kepentingan assosional atau associational interes group merupakan kelompok kepentingan yang memiliki struktur organisasi yang formal. Kelompok kepentingan ini dalam memperoleh pendukung-pendukungnya juga melalui prosedur yang teratur yang kadang-kadang cukup berbelit-belit.

Pada umumnya kelompok kepentingan ini muncul atau terdapat pada masyarakat atau negara yang telah maju, dan biasanya merupakn masyarakat atau

¹⁰ Ibid, hal 26.

negara industri. Selain itu dapat ditemukan juga pada masyarakat negara yang menganut paham otokrasi.

Kelompok kepentingan assosional jika di ijinan berkembang dengan wajar, akan cenderung untuk menentukan perkembangan kelompok-kelompok kepentingan tipe lainnya.

Jadi artikulasi kepentingan secara umum adalah merupakan artikulasi dari kepentingan-kepentingan yang dirumuskan secara jelas, sedangkan artikulasi kepentingan secara bahasa dapat menyatakan kepentingan-kepentingannya dengan menunjukkan perasaan atau tingkah lakunya yang dapat diketahui dan kemudian di transmisikan ke dalam sistem politik. Jadi perbedaan antara artikulasi kepentingan secara umum dan secara bahasa terletak pada perumusan kepentingan-kepentingan itu sendiri dan cara penyampaiannya. Pada artikulasi kepentingan secara umum, kepentingan-kepentingan dirumuskan secara jelas dan kemudian ditransmisikan secara tegas kadalam sistempolitik. Sedangkan artikulasi kepentingan secara bahasa, kepentingan-kepentingan tidak dinyatakan secara tegas dan jelas. Apabila di suatu masyarakat atau Negara terdapat lebih banyak artikulasi kepentingan secara bahasa. Maka hal ini akan membawa kapada akibat yang menyulitkan bagi para elit untuk menafsirkan kepentingan-kepentingan atau tuntutan masyarakat secara akurat atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.¹¹

¹¹ Ibid hal 27

2. Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa adalah mahluk yang istimewa, mereka ada pada lapisan usia yang memungkinkan untuk senantiasa enerjik dan cocok untuk menjadi pelopor perubahan, secara sosial mereka juga istimewa, mereka memperoleh status elit dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan. Mahasiswa juga sering dijuluki sebagai calon intelektual atau juga seringkali sarat dengan predikat "*agent of change*" atau juga disebut "*agent of development*".

Sebagai cendekiawan muda, mahasiswa sebagaimana yang dikemukakan oleh Lewis Coher adalah: "Orang-orang yang kelihatannya tidak puas menerima kenyataan sebagaimana adanya, mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungan dengan kebenaran yang lebih tinggi dan luas".

Arbi Sanit memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam tiga fungsi terakhir. Sementara itu Samuel Huntington menyebutkan bahwa kaum intelektual di perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi.

Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik.¹²

1. sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat.

¹² Arbi Sanit, *Sistim Politik Indonesia*, Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 1981, hal.107-110.

2. sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda.
3. kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari.
4. mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Dari beberapa konsepsi serta ciri dominan tentang mahasiswa, bahwa yang disebut mahasiswa adalah mereka yang selama ini menuntut ilmu yang relatif tinggi di universitas, dibandingkan masyarakat lainnya.

Menurut Arbi Sanit,¹³ mahasiswa sebagai warga masyarakat yang sedang menempuh proses pendidikan tertinggi, maka dengan sendirinya mahasiswa dipandang sebagai kaum intelektual. Didalam golongan kaum cendekiawan itu sendiri, mahasiswa dianggap sebagai pihak yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi warga intelektual yang sepenuhnya.

Ada sebuah kombinasi diantara kesadaran diri sebagai warga kaum cendekiawan dengan pandangan umum terhadap posisi mereka serta harapan dari masyarakat terhadap sumbangsih kaum inteligensia, yang merupakan kekuatan

¹³ Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antra Moral dan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) Hal 46

pendorong bagi mahasiswa untuk turut mengemban peran dirinya sebagai golongan intelektual. Berdasar kapasitasnya sebagai kekuatan massa dan pemula, mahasiswa dituntut melaksanakan peran serta fungsi sebagai kaum intelektual. Salah satu fungsi utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa ialah mempengaruhi terjadinya perubahan sosial serta memainkan peran-peran politiknya. Apabila kemudian mahasiswa membangun organisasi sebagai alat bagi pelaksanaan fungsi serta peran tersebut, itulah yang kata Arbi Sanit didalam tulisannya, sebagai sebuah perubahan yang sedang diciptakan dalam sebuah gerakan mahasiswa.

Gerakan mahasiswa haruslah bercampur dengan berbagai kekuatan *civil society* yang lain. Mereka menuntut perubahan sistem yang kemudian berubah menjadi sebuah gelombang sejarah berupa runtuhnya kekuatan ekonomi politik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Dalam sebuah konstelasi politik, mahasiswa bukanlah kekuatan serta pemain yang paling utama, gerakan mahasiswa berhasil bukan karena mahasiswa sebagai pelaku utamanya, tapi karena adanya koalisi perubahan terdiri dari berbagai banyak elemen, yaitu kaum reformasi baik dari kalangan militer, teknokrat, intelektual maupun dari kalangan publik internasional. Tanpa terbentuknya koalisi yang strategis, gerakan mahasiswa itu akan berhenti sebagai gerakan mahasiswa bukan gerakan perubahan yang mampu menciptakan sejarah yang baru. Muhammad Fadjroel Racman,¹⁴ dalam tulisannya mengatakan bahwa gerakan mahasiswa adalah

¹⁴ Muhammad Fadjroel Racman, *Gerakan Mahasiswa, Reziem Tiani Dan Ideologi Reformasi* (Jakarta: Madani Press, 1999)

sebagai sebuah gerakan moral yang berpotensi bukan pada kalah atau menang, maupun kuat atau lemah, tapi ia berdasarkan spirit perjuangan dalam menegakan kebenaran.

Adapun bentuk-bentuk gerakan mahasiswa,¹⁵ antarlain aksi demonstrasi, aksi mogok makan, pengorganisasian kaum petani serta advokasi-advokasi terhadap masyarakat. Demonstrasi dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan sikap mahasiswa terhadap suatu hal atau suatu peristiwa yang dilakukan untuk

menentang segala kebijakan yang dikelarkan oleh pemerintah. Aksi protes ini biasanya menjadi ciri utama (trade mark) dari gerakan mahasiswa, aksi demonstrasi mahasiswa menjadi alat yang sangat ampuh untuk menunjukkan sikap kritis, dengan maksud suara mereka akan diketahui oleh para pemegang kebijakan. Dengan sasaran para pengambil kebijakan tersebut, sesuai dengan aspirasi yang disuarakan oleh gerakan demonstrasi mahasiswa tersebut.

Bila dilihat dari proses sejarahnya menurut Eep Saefulah Fattah, gerakan mahasiswa bisa dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, kecaman-kecaman terhadap masalah politik secara umum, fase ini merupakan kristalisasi dari gejala kehidupan politik mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh situasi yang memperhatikan kehidupan umum serta mahasiswa itu sendiri, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan terhadap penguasa.¹⁶

¹⁵ Farizal, *Pola gerakan Mahasiswa Pasca Orde Baru: Studi Deskriptif KAMMI dan BEM dalam mengawal Agenda Reformasi Pada Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid*. (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, UMY. 2004)

¹⁶ *Majalah tarbawi dalam topik bila mahasiswa "Bersidang Dijalan"* Edisi 3720 juni 2002

Kemudian kedua, pendirian serta pengembangan gerakan secara ekspilisit dengan landasan ideologis, setelah mengalami kejenuhan bergelut dalam kehidupan kampus, mahasiswa mulai bergelut di jalan.¹⁷

Jadi gerakan mahasiswa dapat disimpulkan sebagai elemen oposisi yang terus bergerak dinamis dalam merespon setiap peristiwa politik, dan biasanya diiringi oleh mobilisasi massa yang sangat masif dalam bentuk aksi njuk rasa.

Namun seperti halnya gerakan sosial umumnya senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun ke jalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana. Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut. Upaya mahasiswa membangun organisasi sebagai alat bagi pelaksanaan fungsi intelektual dan peran tidak lepas dari kekhawasannya. Motif mahasiswa membangun organisasi adalah untuk membangun dan memperlihatkan identitas mereka didalam merealisasikan

¹⁷ Tarbawi *loc.cit*

peran-peran dalam masyarakatnya. Bahkan mereka membangun organisasi karena yakin akan kemampuan lembaga masyarakat tersebut sebagai alat perjuangan. Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa mulai dari aktivis intelektual yang kritis melalui seminar, diskusi dan penelitian merupakan bentuk aktualisasi. Selain kegiatan ilmiah, gerakan mahasiswa juga menyuarakan sikap moralnya dalam bentuk petisi, pernyataan dan suara protes. Bentuk-bentuk konservatif ini kemudian berkembang menjadi radikalisme yang dimulai dari aksi demonstrasi di dalam kampus. Secara perlahan karena perkembangan di lapangan dan keberanian mahasiswa maka aksi protes dilanjutkan dengan turun ke jalan-jalan.

Bentuk lain dari aktualisasi peran gerakan mahasiswa ini dilakukan dengan menurunkan massa mahasiswa dalam jumlah besar dan serentak. Kemudian mahasiswa ini mendorong desakan reformasi politiknya melakukan pendudukan atas bangunan pemerintah dan menyerukan pemboikotan. Untuk mencapai cita-cita moral politik mahasiswa ini maka muncul berbagai bentuk aksi seperti umumnya terjadi dalam, gerakan sosial.

Arbi Sanit menyatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa fungsinya sebagai penguat tuntutan bukan sebagai kekuatan pendobrak penguasa. Strategi demonstrasi diluar kampus merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat massa mahasiswa.

Peran mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan massa untuk mendorong reformasi politik adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kaum intelektual. Berbeda dengan gerakan revolusi, gerakan reformasi seperti

dikatakan, Nanlin, berbeda dengan gerakan revolusi yang mengejar perubahan struktural yang fundamental. Gerakan reformasi berusaha memodifikasi hubungan struktural tanpa mengancam eksistensi institusi. Menurut Arbi ada dua tahap dalam reformasi politik.

Pertama, tahap transisi yang merupakan proses peralihan dari proses krisis politik ke proses normal kehidupan politik. Di tahap transisi, pemicu proses reformasi akan mengawali aktualisasinya. Ada lima kemungkinan peristiwa politik yang berpotensi menjadi pemicu yang akan mengawali berlangsungnya proses reformasi politik yaitu kudeta, kesadaran penguasa, tekanan publik opini kepada penguasa, presiden meninggal dan people's power yang aktif dan kuat.

Kedua, reformasi normal dimana reformasi dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada. Reformasi normal ini dilakukan melalui reformasi suprastruktur dan infrastruktur.

Arbi Sanit menyebutkan, reformasi politik mahasiswa terfokus kepada suksesi kepemimpinan, penegakan pemerintahan yang kuat-efektif sehingga produktif, penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijakan publik yang adil dan tepat dan demokratisasi politik. Berikut ini Arbi menyajikan tabel sebuah analisa sistematis mengenai peran strategis pembaharuan mahasiswa Asia dalam dekade 1990-an.¹⁸

¹⁸ [www. Demonstrasi. Co. cc / 2009/04/ Gerakan Mahasiswa Tinjau Teoritis. html](http://www.Demonstrasi.Co.cc/2009/04/GerakanMahasiswaTinjauTeoritis.html)

TABEL 1.1

TABEL MENGENAI PERAN STRATEGIS PEMBAHARUAN MAHASISWA

STRUKTUR PERUBAHAN	PROSES PEMBAHARUAN
1. Posisi Sosial Mahasiswa-Kekuatan Pembaharu -Kekuatan profesional	MYANMAR, KOREA SELATAN, INDONESIA, CINA
2. Kondisi Masyarakat-Stabil/Mapan-Krisis/Cenderung krisis	
3. Obyek Pembaharuan Mahasiswa:- Konsepsi kehidupan- Struktur-kultur Proses- Kebijaksanaan	

Gerakan mahasiswa sebagai gerakan sosial yang menghendaki perubahan sosial melalui sebuah reformasi. Langkah reformasi mahasiswa dilakukan dengan melakukan gerakan moral yang merupakan identitas paling kental dengan mahasiswa yang memiliki posisi pendidikan paling lama. Gerakan massa yang dilakukan dengan aksi turun kejalan secara terus menerus merupakan bagian dari cara memperkuat tuntutan moralnya untuk terjadinya reformasi politik.

3. Himpunan Mahasiswa Islam

Dalam perjalanannya, HMI telah banyak melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Hampir di sepanjang pemerintahan Orde Baru selalu ada mantan kader HMI yang duduk di kabinet. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran signifikan HMI dalam keikutsertanya menumbangkan Orde Lama serta

menegakkan Orde Baru. Selain itu, sebagai ormas mahasiswa Islam yang Independen dan bergerak dijalur Intelektual, tidak jarang HMI melahirkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia. Beberapa kader HMI bahkan sering melontarkan wacana pemikiran Islam yang mengundang kontroversi.

Berbagai kalangan baik anggota, alumni, maupun pengamat, sudah memunculkan ide dan harapannya. Bahkan yang tak kalah menariknya, bursa calon ketua PB juga sudah mulai ramai. Hal itu menandakan bahwa HMI bukan sekedar organisasi kampung. Artinya, eksistensi organisasi yang lahir 5 februari 1947 ini sudah tidak diragukan lagi di negeri ini. Ini tentu sangat beralasan, mengingat peran HMI bagi bangsa ini cukup besar. HMI telah melahirkan para muslim cendekia sekaliber Nurcholis Madjid dan ratusan cendekiawan muslim, baik yang duduk dalam pemerintahan maupun yang nonpemerintahan.

Diakui atau tidak, mereka menjadi cendekiawan-cendekiawan yang berkualitas ini tidak terlepas dari peran organisasi HMI. Semasa mereka menjadi mahasiswa, HMI telah mendidik dan menggembelngnya, baik dalam nilai-nilai moral (agama) maupun nilai-nilai akademis yang menjadi bekal penting untuk menjadi pemimpin bangsa. Namun peran HMI dalam masyarakat dan keberhasilan HMI mencetak kader-kader bangsa akhir-akhir ini dinilai banyak kalangan mulai surut. Kenyataan seperti ini tidak terlepas dari realitas sosial politik yang ada sekarang. Tak bisa dimungkiri, realitas saat ini sangat berbeda

pada zaman dulu. Faktor Eksternal juga sangat mempengaruhi keberadaan organisasi HMI. Bahkan Ketua Umum PB HMI 1992-1994 M.

Namun, meski faktor Eksternal sangat mempengaruhi peran HMI saat ini, satu hal yang tak kalah pentingnya adalah melihat kembali faktor Internal organisasi ini. Sebab bukannya tidak mungkin penyebab kejumudan seperti yang dilontarkan Malik Fadjar tersebut justru bermuara pada faktor Internal, seperti sistem pengkaderan, setrategi perjuangan, struktur organisasi dan yang tak kalah pentingnya adalah orientasi aktivis oraganisasi.¹⁹

HMI sebagai organisasi yang telah dewasa, tentunya sudah sering melewati berbagai ujian sehingga pernah mencapai puncak kegemilangannya. Sebagai organisasi mahasiswa muslim yang mempunyai nilai-nilai dasar perjuangan (NDP), HMI mempunyai dasar pijakan dan pilihan tegas terhadap wacana keislaman, kecendekiawanan dan ke Indonesiaan.

Darisegi struktural, pilihan ini harus memberikan prioritas restrukturisasi reorientasi HMI dengan penekanan pada upaya pengkaderan secara menyeluruh, yang diformulasikan pada kepemimpinan umat dan bangsa. Sedangkan pada sisi esensial gerakan, HMI ingin selalu menjadi aktor bagi gerakan Intelektual dan kultural.

Dalam menatapkan langkahnya, HMI juga tidak bisa terlepas dari gesekan dengan kondisi Internal maupun Eksternal organisasi. Kondisi Internal

¹⁹ Agussalim Sitompul, *HMI Mengayuh Di Antara Cita Dan Kritik*, (CV Misaka Gazali 1997) hlm 781

mengharuskan HMI untuk tetap menetapkan pilihan pada gerakan intelektual dan kultural, dengan menjadikan ajaran Islam sebagai barometer pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan di sisi eksternal berusaha menarik HMI untuk selalu berhadapan dengan kondisi nasional dan global yang secara ideologis-politis menuntut pemikiran yang cerdas, kritis dan Independen dengan tetap berpegang pada komitmen gerakannya. Untuk itulah HMI selalu berkhitmat dan konsisten terhadap komitmen gerakan intelektual dan kultural sebagai basis perjuangannya. Tafsir terhadap wacana ke Indonesiaan dan keislaman massa depan, memerlukan pemikiran ulang yang serius bagi semangat zamannya.²⁰

Dalam kaitan ini, visi keislaman yang dikembangkan HMI juga tidak lepas dari spektrum atau modernisasi. Terlihat pada Nilai Identitas Kader (NIK), sebuah rumusan besar wawasan HMI, yang dirumuskan Nurcholish Madjid dan dua orang temannya pada dasa warsa 1960-an. Nilai Identitas Kader (NIK) ternyata sangat sarat dengan gagasan-gagasan pembaruan, khususnya pembaruan versi Nurcholish Madjid.²¹

Gagasan Cak Nur itu sangat dipengaruhi teori modernisasi dan berkecendrungan developmentalis. Kecendrungan seperti ini, sebagaimana mewarnai visi keislaman, Nilai Identitas Kader perlu ditinjau kembali secara kritis. Sikap ini penting dalam rangka memperbarui gagasan keagamaan dan pengembangan Intelektualisme Islam di Indonesia.

²⁰ Ibid hlm 783

²¹ Ibid hlm 789

Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama* esensi pembaruan adalah menanamkan pesan agama dalam konteks perkembangan sosial, budaya dan masyarakat. Konseptualisasi Islam yang dirumuskan semestinya tidak mempertegas keterpisahan kata dari realitas manusia sehari-hari. Dalam hal ini agaknya tidak berlebihan untuk menyebutkan bahwa rumusan Islam yang tercermin dalam Nilai Identitas Kader banyak yang harus diperbarui. Sebab, ia dirumuskan dalam spektrum paradigma modernisasi yang terjebak dalam ortodoksi sehingga menomorduakan ortopraktis. Islam lahir sekedar jadi bangunan teoritis yang indah, tapi mandul karena terlepas dari realitas. Dari sudut ini tampak, bahwa fokus pengembangan pemikiran Islam saat ini adalah kekonkretan. Pemikiran Islam demikian lebih di arahkan untuk menghadapi persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Untuk itu, diperlukan kajian keislaman yang bertolak dari realitas sosial seperti pada teologi pembebasan. Gerakan teologi ini sangat menekankan pembebasan dan perjuangan kedilan. Pemikiran Islam yang dikembangkan HMI dewasa ini, hendaknya mengarah pada semangat teologi di atas. Tujuannya adalah agar HMI mampu membumikan pesan agama dalam realitas sejarah.

Kedua, doktrin kerakyatan dalam Nilai Identitas Kader perlu di pertegas, sehingga HMI semakin jelas dan nyata keberpihakannya pada rakyat. Sikap ini penting untuk menghilangkan kesan bahwa HMI adalah sebuah organisasi yang elitis, disatu sisi dan fungsinya tidak lebih sekedar perpanjangan tangan birokrasi, pada sisilain. Salah satu agenda besar yang sedang diperjuangkan rakyat

Indonesia dewasa ini disadari atau tidak HMI dituntut keterlibatannya adalah keharusan demokratisasi. Strategi perjuangan HMI dengan demikian harus di orientasikan pada persoalan bagaimana mewujudkan iklim demokratis tersebut. Paling tidak ada konsensus bersama bahwa jatidiri HMI adalah bersikap Inklusif, berpihak pada rakyat dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Komitmen seperti ini, dalam tubuh HMI merupakan refleksi dari visi keislaman yang Intelektualistik.

4. Peran

Peran menurut Jack C. Plano, Rober E, Riggs dan hellena S robin adalah, perangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam kelompok sosial.²²

Dari paparan diatas bahwa konsep peranan berhubungan dengan prilaku dan tingkah laku seseorang atau kelompok karena tuntutan dan posisi yang didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

Peranan menurut Astrid S Susanto sedikitnya mengandung tiga hal yaitu :

- a. Peranan adalah multi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

²² Jack C. Plano, Robert E. Riggs Den Hellena S Robin, *Terjemahan Oleh Edisi Seregar, Kamus Analisa Politik, Rajawali Pers*, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal 220

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh Individu dalam masyarakatnya sebagai organisasinya.
- c. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku Individu yang penting bagi struktur sosial.

Dari ketiga hal tersebut yang penting adalah Interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada disekitarnya. Ketika Interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka Individu yang dapat memberi sedikit akan cenderung menentukan Interaksi. Dengan kata lain, individu memiliki kekuatan yang dominan atas Individu lainnya, dimana itu mempunyai kekuasaan. Sementara itu kedudukan yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumberlain. Selain kekayaan dan kehormatan ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta keterampilan yang dipilih secara priodik.

Pendapat lain mengenai peranan disampaikan oleh Kontjaraningrat, ”peranan adalah tingkah laku Individu yang menetaskan suatu kedudukan tertentu.²³

Menurut Kontjaraningrat peranan dapat dilakukan oleh Individu yang memiliki kepentingan-kepentingan yang ada di suatu kelompok atau organisasi tertentu sebagai salah satu bagian dari tugasnya.²⁴

Peran dapat juga diartikan sesuatu yang menjadi bagian sesuatu atau yang memegang pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang

²³ Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal 95

²⁴ Ibid.

dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungannya dengan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Dari pendapat yang tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi, dan mengembangkan pelaksanaan tugas-tugasnya disertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku demi terciptanya sebuah tujuan yang telah ditentukan.

5. Pergulatan Politik

Politik merupakan proses pembuatan,²⁵ dan penegakkan keputusan untuk kepentingan umum. Kata “politik” mengandung pengertian publik. Secara historis, politik di artikan sebagai usaha membicarakan apa yang menjadi kebaikan bersama bagi para warga yang hidup dalam polis. Selain itu, politik merupakan keputusan yang mengikat seluruh masyarakat. Sehubungan dengan itu, pendapat yang dikemukakan oleh Robert Dahl bahwa menyangkut *power, rule, and authority* tidak dapat diterima.

Konsep politik sebagai penyelenggaraan negara terutama yang menyangkut kewenangan negara dalam memonopoli penggunaan paksaan fisik, tetap menjadi salah satu aspek yang dikaji dengan ilmu politik. Memandang

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Penerbit PT. Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta, 1994

politik secara fungsional dapat dikatakan sebagai pendekatan yang cukup dominan dalam ilmu politik.²⁶ Misalnya.

1. Partisipasi politik

Seiring perkembangan dinamika politik dalam negeri pelaksanaan komunikasi politik pada masa sekarang bukan lagi menjadi dominasi fungsi partai politik. Berbagai media informasi dan telekomunikasi dapat digunakan secara langsung untuk berkomunikasi antara masyarakat baik secara Individu maupun organisasi atau kelompok dengan pejabat pemerintah atau wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik antara lain yaitu :

- a. Kegiatan atau perilaku luar Individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi.
- b. Kegiatan yang di arahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat-pembuat dan pelaksana keputusan politik seperti : kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum. Alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan yang mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
- c. Kegiatan yang berhasil (efektif), maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

²⁶ Samuel P. Huntington, Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 1994.

- d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.
- e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, melekatkan kotak tatap muka, dan menulis surat, maupun cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi, pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah). Hur-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan senjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Seperti mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik, dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya partisipasi pasif merupakan kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi politik yang tidak diimbangi dengan kekuatan institusi-institusi negara, pasar dan lokal akan mengakibatkan terjadinya kekacauan sosial. Untuk

itu diperlukan pelembagaan partisipasi politik yang terdiri dari dua bentuk, yaitu pelembagaan secara formal dan substansial. Pelembagaan formal mengacu pada prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan dengan undang-undang, seperti kepesertaan dalam partai, keikutsertaan pemilu, keterlibatan pengambilan kebijakan publik, ekspresi unjuk rasa, keterwakilan perempuan, dan lain-lain. Sedang Pelembagaan partisipasi substansial lebih berorientasi pada nilai, kesadaran dan sikap volunter individu untuk terlibat dan peduli pada problem sosial, ekologis dan ketertiban lingkungan.²⁷

Keberadaan dua bentuk partisipasi ini akan menguatkan proses sosial menuju tatanan demokrasi yang ditandai dengan penguatan lembaga-lembaga negara, ekonomi dan masyarakat (civil society). Namun dalam perubahan masyarakat menuju demokrasi tidak tertutup kemungkinan terjadinya distorsi partisipasi akibat pergulatan berbagai kepentingan yang bernuansa ekonomi-politik. Contohnya, politik uang yang merajalela jelas mengacau-balaukan proses partisipasi sosial sehingga yang terjadi adalah mobilisasi kelompok yang dimotori oleh spirit uang, kondisi seperti ini sudah menunjukkan geliat-geliatnya di daerah kita Sumbawa Barat, yang dilakukan oleh segelintir orang (caleg ataupun tim sukses) dengan janji-janji muluk yang secara rasional kita berpikir sangat tidak masuk akal. Selain itu ada dari beberapa oknum caleg yang terkadang memanfaatkan posisi atau jabatannya saat ini, baik berupa program yang di

²⁷ [http://www.blokspot/opini/Dinamika Politik Lokal](http://www.blokspot/opini/Dinamika_Politik_Lokal). Di Akses Tanggal 14 April 2010

jalankan oleh Instansinya (Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, LSM atau sejenisnya) untuk mengambil hati masyarakat untuk kepentingannya secara pribadi di tahun 2009 nanti, padahal sejatinya caleg-caleg tersebut harus membangun pendidikan politik yang sehat dalam masyarakat. Untuk itu, Masyarakat harus menyadari bahwa politik uang atau politik pemanfaatan program (dalam hal ini jabatannya saat ini) merupakan politik kotor yang secara tidak langsung telah mendidik masyarakat kita menjadi kaum materialis, padahal hakekat perwakilan adalah penyampaian aspirasi dan keinginan yang tentunya masyarakat harus betul-betul pintar dalam memilih wakilnya dengan selalu mengedepankan hati nurani, karena mereka yang dipilih nantinya merupakan orang-orang pilihan yang akan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan. Ketika fenomena upaya mencapai kuasa menghalalkan segala cara merebak, maka hal ini merupakan bentuk de-institusionalisasi partisipasi yang melawan perubahan sosial menuju tatanan demokratis. Apabila kita salah memahami maka fenomena tersebut dapat menjadi bentuk pelembagaan politik pragmatis yang bersumber pada spirit "tujuan menghalalkan segala cara" yang melawan semangat partisipasi menuju demokrasi.

Primordialisme dan Politik Lokal. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kebijakan dalam upaya memberikan ruang gerak masyarakat di tingkat lokal agar bisa lebih meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan tatanan sosial yang demokratis agar masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan

dapat terwujud. Asumsinya adalah ketika kekuatan-kekuatan lokal diberi ruang dalam proses politik akan terbentuk tata pemerintahan yang baik karena masyarakat lokal bisa menyelenggarakan pemerintahan sendiri, terjadi partisipasi publik dan transparansi. Kekuatan lokal merupakan bagian dari kemajemukan yang akan mendorong terwujudnya masyarakat demokratis sejauh kesadaran tertib sosial (civility) merupakan semangat dari penguatan masyarakat warga (civil society) menjadi pijakan utamanya. Lokalitas akan menjadi destruktif bila negara dan kekuatan-kekuatan sosial tidak mampu memfasilitasi.

Perkembangan dan wacana tentang dunia perpolitikan sampai kapanpun akan selalu menarik untuk di kaji secara lebih lanjut. Sebab bagaimanapun juga dunia perpolitik merupakan salah satu jalan yang paling efektif yang biasa digunakan oleh elit penguasa untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang lebih tinggi tersebut. Entah perpolitikan yang digunakan itu melalui politik yang kotor maupun politik yang bersih. Namun yang jelas dunia perpolitikan selalu menjadi sorotan seluruuh masyarakat dan dunia publik. Memang Sejak proses reformasi digulirkan delapan tahun terakhir ini, terjadi pergeseran pendulum politik pasca Orde Baru yang merambah hingga ke ranah politik lokal. Pasca masa Orde Baru, kondisi dan dinamika politik yang terjadi di sangat tampak lebih sering sekali menggejolak dan selalu menjadi sorotan dunia

Publik. Keadaan semacam ini setidaknya dapat dijelaskan oleh tiga faktor yang paling memumental.²⁸

- a. konflik politik lokal berpeluang lebar muncul sebagai konflik terbuka, dan tak bisa ditutup-tutupi lagi, misalnya oleh kekuatan politik tingkat pusat. Sebab pada zaman Orde Baru, jangankan konflik politik, konflik sosial pun "tidak sampai ke permukaan". Itu disebabkan kuatnya "negara" dalam mengontrol segala hal (tetek bengek) urusan politik dari tingkat lokal hingga nasional, dengan pola kebijakan yang amat sentralistik. Sehingga memunculkan kebebasan yang belum pernah dialami.
- b. akibat ledakan politik yang belum bisa lepas sepenuhnya dari fenomena eforia. Hakikat berpolitik pun rata-rata belum bisa dipahami secara benar. Menjadi politisi masih dianggap sama dengan profesi lain. Mochamad Basuki, misalnya, bahkan terang-terangan mengatakan, kalau mau kaya jadilah politisi. Tentu saja ungkapan ini agak aneh, mengingat profesi politisi, berbeda dibanding pengusaha.
- c. bisa dijelaskan dengan teori "desentralisasi korupsi". Meminjam sinyalemen Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, pasca-Orde Baru, tak hanya struktur kebijakan sentralistik yang berubah, seiring otonomi daerah (desentralisasi), tetapi juga pola korupsinya. Bila dulu korupsi terpusat, itu bisa dipilah ke lingkup "istana" (Cendana), kini

²⁸ [http://www.jurnalnet./Pergulatan Politik](http://www.jurnalnet./Pergulatan%20Politik). Di Akses Tanggal 14 April 2010

polanya menyebar dan merata dari tingkat pusat dan daerah. Setidaknya lebih ekspresif.

Dalam perjalannya, pergulatan politik di bawah panca otonomi memiliki banyak persoalan yang cukup pelik. Hal ini disebabkan karena banyaknya elemen masyarakat yang ingin menduduki roda kepemimpinan, meskipun dalam ranah arus bawah. Sehingga banyak menimbulkan konflik dan pertumpahan darah yang tak pernah terselesaikan. Ironisnya, dalam keadaan semacam ini, maka kekuatan dan kekayaanlah yang menentukan. Meskipun orangnya cerdas dan mempunyai jiwa kepemimpinan serta komitmen yang tinggi, akan dengan mudahnya tersingkirkan dalam pertarungan. Jika orang tersebut tidak mempunyai kekayaan untuk menyogok dalam pemilihan tersebut. Dan hal semacam ini akan tetap saja terus terjadi akibat dari kebebasan yang mereka miliki.²⁹

5. Pemilu dan Sitem Pemilu

Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat akan berdukat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintah yang berkuasa berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil

²⁹ Ibid

pemerintahan yang berkuasa adalah yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya.

Berdasarkan tatanan demokrasi, pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan keterwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjaga. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.

Ilmu politik mengenal dua macam pemahaman tentang demokrasi *pertama*, pemahaman demokrasi secara normatif. *Kedua*, pemahaman demokrasi secara empirik. Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan suatu kondisi yang secara ideal ingin diselenggarakan oleh suatu negara. Sedangkan dalam pemahaman empirik, demokrasi di kaitkan dengan kenyataan penerapan demokrasi dalam tataran kehidupan politik praktis³⁰.

³⁰ Affan Gafar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 3-4*

Untuk melihat apakah demokrasi diterapkan dengan baik dalam kehidupan politik secara empirik, para ahli politik membuat berbagai Indikator untuk mengukurnya. Antara lain Robert Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dalam segi politik, secara bersama-sama berdaulat, memiliki kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan untuk pemerintah diri mereka sendiri. Indikator demokrasi yang diajukan dalh adalah sebagai berikut:³¹

- a. Adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
- b. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka dan bebas.
- c. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
- d. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum.
- e. Setiap warga negara memiliki Hak politik, seperti kebebasan berekspresi, dan mengeluarkan pendapat, termasuk didalam nya mengkritik pemerintah.
- f. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain.

³¹ Robert Dahl, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.1

- g. Setiap negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga-lembaga otonom, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan mengikuti pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.

Adapun pelaksanaan pemilu 2009 berdasarkan pada UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2, yaitu :

Ayat 1 : *Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*

Ayat 2 : *Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*

Agar pemilu dapat berjalan sukses maka diperlukan sebuah sistem pemilu. Tidak diragukan lagi bahwa sistem pemilihan umum memainkan peranan penting dalam sebuah sistem politik, walaupun tidak dapat kesepakatan mengenai seberapa penting sistem pemilihan umum dalam membangun struktur sebuah sistem politik. Giofani Sartori menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum adalah “sebuah bagian yang paling isensial dari kerja sistem politik. Pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah di manipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi”. Tekanan juga diberikan oleh *Arend Lijphart* yang mengatakan “sistem pemilihan umum adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan”.

Menurut Benjueno *Theodore*, istilah sistem pemilu memiliki definisi yang sempit dan ketat. Yaitu : ‘sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan dimana pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.³²

Difinisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting berada di luar

³² [www.blogspot.com/Theodore Benjuino, Sistem Pemilihan Umum : Pemilu Indonesia](http://www.blogspot.com/Theodore%20Benjuino,%20Sistem%20Pemilihan%20Umum%20%3A%20Pemilu%20Indonesia.com). Com 10 April 2010

lingkup pembahasan sistem pemilihan umum. Adapun elemen dari sistem pemilihan umum adalah³³ :

1. Besaran Distrik

Yang dimaksud dengan distrik adalah wilayah geografis suatu negara yang batas-batasnya dihasilkan melalui suatu pembagian untuk tujuan pemilihan umum. Dengan demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan besar wilayah administrasi pemerintahan, dapat pula berbeda. Definisi besar distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik bukan berarti berapa jumlah pemilih yang ada dalam distrik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut maka kita dapat membedakan distrik menjadi distrik beranggota tunggal (*single member district*) dan distrik beranggota jamak (*multi member district*)

TABEL 1.2

DISTRIK BERANGGOTA JAMAK

Jumlah Kursi yang Diperebutkan	Sub Kategori
2-5	Distrik Kecil
6-10	Distrik sedang
> 10	Distrik Besar

³³ Ibid.

2. Struktur Kertas Suara

Struktur kertas suara adalah cara penyajian pilihan di atas kertas suara. Cara penyajian pilihan ini menentukan bagaimana pemilih kemudian memberikan suara. Jenis pilihan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kategorikal dimana pemilih hanya memilih satu partai atau calon, dan ordinal dimana pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkan.

3. Electrol Formula

Electrol Formula adalah bagian dari sistem pemilihan umum yang membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Termasuk di dalamnya adalah rumus yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi, serta batas ambang pemilihan.

Tabel 1.3 di bawah memberikan gambaran ringkas mengenai beberapa jenis sistem pemilihan umum.

TABEL 1.3
JENIS-JENIS SISTEM PEMILU³⁴

Sistem	Ukuran Distrik	Tipe	Deskripsi
First Past the Post (FPTP)	tunggal	Pluralitas	Kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang terpilih, walaupun tidak mencapai mayoritas sederhana.
Sistem Dua Putaran	tunggal	mayoritas	Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas sederhana, diadakan pemilihan-pemilihan lanjutan diantara dua kandidat dengan suara terbanyak. Pemenang pemilihan lanjutan yang akan terpilih.
Alternative Vote	tunggal	mayoritas	Pemilih menentukan pilihan sesuai dengan urutan Preferensi. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas berdasarkan Preferensi pertama, maka calon dengan Preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai dengan pilihan keduanya. Proses di ulangi sampai ada calon dengan suara mayoritas.
Block vote (BV)	jamak	Pluralitas	Pemilih memberikan pilihan sebanyak jumlah kursi tersedia. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih.
Sistem Dua Putaran	jamak	Semi proporsional	Pemilih memberikan satu pilihan. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih.
Single Transferable Vote (STV)	jamak	proporsional	Pemilih menentukan pilihan sesuai dengan preferensi. Kandidat dengan pilihan pertama mencapai quota akan

³⁴ www.blogspot.com/ Theodore Benjuino, *Sistem Pemilihan Umum : Pemilu Indonesia*. Com 10 April 2010

			terpilih. Calon dengan preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai pilihan keduanya. Proses di ulangi sampai di peroleh calon yang mencapai quota.
Paralel Vote	campuran	Semi proporsional	Legislatur terdiri dari mereka yang terpilih lewat puralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal di tambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak.
Mixed Member Proporsional (MMP)	campuran	proporsional	Legislatur terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal di tambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak. Kursi proporsional di berikan untuk mengkompensi efek disproportional yang timbul dari hasil distrik beranggota tunggal.
Representasi Proporsional Daftar	jamak	proporsional	Pemilih memilih dari daftar yang disediakan, kursi diberikan sesuai proporsi suara yang diterima oleh partai. Kandidat terpilih berdasarkan urutannya dalam daftar.

Namun dalam memilih sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berlaku umum disemua negara. Kunci utama dalam memilih sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan.

Berikut perubahan-perubahan sistem pemilu yang terjadi di Indonesia dari Orde baru hingga pemilu 2009, yaitu :

- a. Pada masa Orde Baru hingga pemilu 1999 Indonesia menggunakan Sistem Pemilu representasi proporsional daftar tertutup.
- b. Pada pemilu 2004 Indonesia menggunakan Sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka, dengan penetapan calon terpilih masih dibatasi dengan perolehan suara sebesar BPP (Bilangan Pembagi Pemilih).
- c. Pada pemilu 2009 Indonesia menggunakan Sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka dengan penetapan calon suara terbanyak.

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konsep adalah batasan konseptual yang dipakai oleh peneliti dengan tujuan agar tidak menimbulkan salah penafsiran atau salah perspektif dalam memahami isi atau variabel yang hendak diteliti.

1. Interes Group

artikulasi kepentingan secara umum adalah merupakan artikulasi dari kepentingan-kepentingan yang dirumuskan secara jelas, sedangkan artikulasi kepentingan secara bahasa dapat menyatakan kepentingan-kepentingannya dengan menunjukkan perasaan atau tingkah lakunya yang dapat diketahui dan kemudian di transmisikan ke dalam sistem politik. Jadi perbedaan antara artikulasi kepentingan secara umum dan secara bahasa terletak pada perumusan kepentingan-kepentingan itu sendiri dan cara penyampaiannya.

2. Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa adalah makhluk yang istimewa, mereka ada pada lapisan usia yang memungkinkan untuk senantiasa enerjik dan cocok untuk menjadi pelopor perubahan, secara sosial mereka juga istimewa, mereka memperoleh status elit dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan.

3. HMI

Salah satu agenda besar yang sedang di perjuangkan rakyat Indonesia dewasa ini disadari atau tidak HMI dituntut keterlibatannya adalah keharusan demokratisasi. Strategi perjuangan HMI dengan demikian harus di orientasikan pada persoalan bagaimana mewujudkan iklim demokratis tersebut. Paling tidak ada konsensus bersama bahwa jatidiri HMI adalah bersikap Inklusif, berpihak pada rakyat dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

4. Peran

Menurut Kontjaraningrat peranan dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kepentingan-kepentingan yang ada di suatu kelompok atau organisasi tertentu sebagai salah satu bagian dari tugasnya.

5. Pergulatan Politik

Konsep politik sebagai penyelenggaraan negara terutama yang menyangkut kewenangan negara dalam memonopoli penggunaan paksaan fisik, tetap menjadi salah satu aspek yang dikaji dengan ilmu politik. Memandang politik

secara fungsional dapat dikatakan sebagai pendekatan yang cukup dominan dalam ilmu politik.

6. Pemilu dan Sistem Pemilu

Dalam perspektif politik sekurang-kurangnya ada tiga fungsi Pemilu, yakni fungsi keterwakilan, fungsi integrasi, dan fungsi mayoritas. Fungsi keterwakilan merupakan urgensi dinegara demokrasi baru dalam Pemilu. Fungsi integrasi menjadi kebutuhan negara yang mengonsolidasikan demokrasi. Dan fungsi mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan pemerintahan.

G. METODE PENELITIAN

1). Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang ingin penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan teknik diskriptif yakni menggambarkan keadaan secara runtut dan melukiskan secara sistematis fakta di lapangan.

2). Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, diperoleh dari data lapangan dengan cara wawancara pada responden yang dianggap mengerti. Data Primer yaitu segala informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan konsep penelitian yang kami peroleh secara langsung dari ketua cabang HMI unit analisis yang dijadikan

sebagai obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh berupa keterangan dan penjelasan langsung dari kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

- b. data Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh tidak secara langsung yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data yang diperoleh adalah dari letertur yang berupa kutipan dari Buku-buku dan internet. yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

3). Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan dokumentasi atau literature yang memuat tentang peran HMI dalam perpolitikan diindonesia yang dapat di manfaat kan untuk memperoleh data. Yaitu:

- a. Wawancara (interview) yaitu penggalian informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang telah ditekankan terutama kepada Wahyu Winarno ketua cabang HMI-Dipo yogyakarta dan para kader-kader HMI yaitu kepada 1. Rahmat Tontro Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda, 2. Nasir sebagai Komunikasi Pemberdayaan Umat, 3. Mulyan Tugo Wasekum Bidang Kepemudaan, 4. Achmad Shohib di bidang departemen dan kepemudaan yang peneliti anggap mengerti dan menguasai persoalan mengenai peran HMI dalam pergulatan politik pada pemilu 2009 .

- b. Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian berupa buku-buku catatan, transkrip, dan sebagainya mengenai topik yang sedang diangkat

Namun demikian peneliti akan tetap menggunakan metode lain agar didapatkan data yang benar-benar mewakili untuk mencari keterangan yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

4). Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisa yang ditujukan atau di sajikan bukan dalam bentuk statistik. Jadi dengan metode analisa data yang digunakan, maka diharapkan di peroleh gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah yang akan di teliti, yang selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan di interpretasi kebenarannya secara urut proses pengumpulan data dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Menelaah setiap data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara ataupun reteratur.
2. Setelah data di telaah data yang ada kemudian di susun kedalam satuan-satuan yang di kategorikan.

3. Data yang diperoleh akan disajikan secara tertulis berdasarkan kasus faktual yang berkaitan.
4. Sedangkan langkah terakhir yang dilakukan yaitu menganalisis data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan kesimpulan.